



## PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU

Jalan HR. Subrantas KM 9 Pekanbaru, Kode Pos : 28294

Telp : (0761) 64023-66455, Fax : (0761) 66455

Website: <http://ptun-pekanbaru.go.id>

Email: [pekanbaru@ptun.org](mailto:pekanbaru@ptun.org)

### KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU NOMOR : W1.TUN6/178/KU.01/3/2018

#### TENTANG

#### PENETAPAN BESARAN HONORARIUM PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DI LINGKUNGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU

#### KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 42/PA/SK/XII/2017 tanggal 4 Desember 2017 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
  - b. Bahwa kelancaran pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dipandang perlu untuk menunjuk serta mengangkat Pejabat Pengelola Keuangan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;
  - c. Bahwa Pejabat Pengelola Keuangan yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dibayarkan Honorarium setiap bulannya dan perlu dibuatkan Penetapan Besaran Honorarium sesuai yang tercantum di dalam DIPA Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);

6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005, tentang Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di lingkungan Peradilan Umum, dan Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peradilan Agama ke Mahkamah Agung Republik Indonesia;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Adminitrasi, dan Finansial di lingkungan Peradilan Militer dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia ke Mahkamah Agung Republik Indonesia;
12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 128/KMA/SK/VIII/2014 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
13. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggung Jawaban Belanja Negara di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Memperhatikan : Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423).

#### M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **PENETAPAN BESARAN HONORARIUM PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DI LINGKUNGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU**
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Nomor W1.TUN6/709/KU.01/12/2017 tentang Penetapan Besaran Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Tahun Anggaran 2018;
- KEDUA : Pejabat Pengelola Keuangan di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru diberikan Honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam kegiatan ini, dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA-005.01.2.578822/2018 tanggal 5 Desember 2017;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, diadakan perbaikan seperlunya.

**SALINAN** Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru

Pada tanggal : 1 Maret 2018

Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Tata Usaha  
Negara Pekanbaru,



**R. INDRA SAPUTRA, S.H., M.H.**

**NIP. 19801120 199903 1 001**

LAMPIRAN: Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor W1.TUN6/ /KU.01/3/2018 tanggal 1 Maret 2018 Tentang Penetapan Besaran Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penguji/ Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Staf Pengelola Keuangan di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.

NO	NAMA, NIP, PANGKAT, DAN JABATAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA	BESARAN HONORARIUM PER BULAN MENJADI (Rp)
1.	<b>R. INDRA SAPUTRA, S.H., M.H.</b> NIP. 19801120 199903 1 001 Pangkat/Gol : Pembina (IV/a) Jabatan : Sekretaris	Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru	700.000
2.	<b>ANDI EFFENDI, S.E.</b> NIP. 19800520 200604 1 006 Pangkat/Gol : Penata (III/c) Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru	600.000
3.	<b>SUHEIMI</b> NIP. 19600827 198103 2 002 Pangkat/Gol : Penata Tk. I (III/d) Jabatan : Kasubbag Umum dan Keuangan	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM	600.000
4.	<b>MERY NELHIDA, S.E.</b> NIP. 19860826 201101 2 008 Pangkat/Gol : Penata Muda (III/a) Jabatan : Staf Sub Bagian Umum dan Keuangan	Bendahara Pengeluaran	860.000
5.	<b>DORA NATALIA SINGARIMBUN, S.E., M.M.</b> NIP. 19811229 200604 2 015 Pangkat/Gol : Penata (III/c) Jabatan : Staf Sub Bagian Umum dan Keuangan.	Staf Pengelola Keuangan	630.000
6.	<b>EKAWATI, S.E.</b> NIP. 19840703 200904 2 011 Pangkat/Gol : Penata Muda Tk I (III/b) Jabatan : Staf Sub Bagian Umum dan Keuangan.	Staf Pengelola Keuangan	630.000
7.	<b>RAMADANIS</b> NIP. 19701102 201408 1 001 Pangkat/Gol : Pengatur Muda (II/a) Jabatan : Staf Sub Bagian Umum dan Keuangan	Staf Pengelola Keuangan	630.000

Ditetapkan di : Pekanbaru

Pada tanggal : 1 Maret 2018

Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru,



**R. INDRA SAPUTRA, S.H., M.H.**  
NIP. 19801120 199903 1 001